



**PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI PIDANA
POKOK YANG BERBENTUK KUMULATIF DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Studi Strata Dua (S-2) Pada Magister Ilmu
Hukum Pascasarjana Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta**

YOGI FIRMANDA JATNIKA PRATAMA

1710622051

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
2019**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Yogi Firmanda Jatnika Pratama
NRP : 1710622051
Tanggal : April 2019

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, April 2019

Yang Menyatakan,



Yogi Firmanda Jatnika Pratama

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Firmanda Jatnika Pratama
NRP : 1710622051
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penerapan Pidana Denda Sebagai Pidana Pokok Yang Berbentuk Kumulatif
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : April 2019

Yang menyatakan,



Yogi Firmanda Jatnika Pratama

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : Yogi Firmanda Jatnika Pratama
NRP : 1710622051
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Penerapan Pidana Denda Sebagai Pidana Pokok Yang Berbentuk Kumulatif Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.



Dr. Emi Agustina, SH., Sp.N
Ketua Penguji



Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH., M.Hum
Penguji I / Pembimbing I



Dr. Mohammad Hatta, SH, MKn.
Penguji / Pembimbing II



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH
Ka. Prodi



Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH
Dekan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 2019

**PENERAPAN PIDANA DENDA SEBAGAI PIDANA POKOK YANG
BERBENTUK KUMULATIF DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

YOGI FIRMANDA JATNIKA PRATAMA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan pidana denda sebagai pidana pokok yang berbentuk kumulatif dalam rumusan ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. Untuk mengetahui penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar dalam putusan 431/Pid.Sus/2015/PN.Bjm, telah sesuai dengan ketentuan pidana denda dalam undang-undang narkotika. Dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penjatuhan dan penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas hukum dan teori system hukum. Terdapat tiga komponen hukum yang saling berpengaruh, yakni struktur, substansi dan budaya hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pidana denda sebagai pidana pokok yang berbentuk kumulatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang belum optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkotika dikarenakan penerapan pidana denda pada pelaksanaannya oleh terpidana tidak dapat dilaksanakan dan digantikan dengan pidan penjara yang menimbulkan ketidakjelasan dalam penafsiran hukm berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Penjatuhan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar terdakwa dalam Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2015/PN.Bjm telah sesuai dengan ketentuan pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi ketidakjelasan penafsiran dalam menerapkan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar menimbulkan suatu ketidakpastian hukum itu sendiri. Hambatan-hambatan penerapan pidana denda bagi pelaku tindak pidana narkotika pada pelaksanaan pemidanaan dengan pidana denda karena tidka berjalan optimal dimana terpidana tidak melakukan pidana denda tersebut serta hambatan dalam penerapan Undang-Undang Narkotika yang masih menimbulkan penfasiran yang keliru dari pasal-pasal yang menerapkan pidana secara kumulatif.

**IMPLEMENTATION OF FINE CRIMES AS CUMULATIVE FORMED
CRIMINALS IN LAW NUMBER 35 OF 2009 CONCERNING
NARCOTICS**

YOGI FIRMANDA JATNIKA PRATAMA

ABSTRACT

This study was conducted to determine the application of criminal penalties as a cumulative principal in the formulation of criminal provisions in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which can provide a deterrent effect for perpetrators of narcotics crimes. To find out the imposition of imprisonment in lieu of fines that cannot be paid in the decision 431 / Pid.Sus / 2015 / PN.Bjm, it is in accordance with the provisions of criminal fines in the narcotics law. And to find out the obstacles in the imposition and application of criminal penalties for perpetrators of narcotics crimes.

The theory used in this study is the theory of the effectiveness of law and legal system theory. There are three components of law that are mutually influential, namely structure, substance and legal culture.

The research method used in this thesis is normative research. Normative legal research is legal research concerning the application of normative legal provisions (codification, law or contract) in action on any particular legal event that occurs in society.

The results of this study conclude that the application of criminal penalties as a cumulative principal in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics that has not been optimal in providing deterrent effects to perpetrators of narcotics crimes due to the imposition of criminal penalties in the implementation by convicts cannot be implemented and replaced with prison prisoners which cause uncertainty in legal interpretation based on the Narcotics Law. The imposition of imprisonment in lieu of criminal penalties that cannot be paid by the defendant in Decision Number 431 / Pid.Sus / 2015 / PN.Bjm is in accordance with the criminal provisions of fines in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics but the obscurity of interpretation in imposing imprisonment as substitute for criminal penalties that cannot be paid creates a legal uncertainty itself. Barriers to the application of fines to narcotics criminals in the execution of crimes with criminal penalties for not running optimally where the convicts did not commit criminal penalties as well as obstacles in the application of the Narcotics Law which still lead to erroneous interpretation of the articles that apply criminal penalties cumulative.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan berkatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul : Penerapan Pidana Denda Sebagai Pidana Pokok Yang Berbentuk Kumulatif Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan telah selesainya penulisan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
2. Dekan Fakultas Hukum, Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH
3. Ibu Dr. Erni Agustina, SH.,Sp.N, selaku Ketua Jurusan
4. Ibu Dr. Dra. Hj. Laily Washliaty, SH.,M.Hum, selaku Pembimbing I
5. Bapak Dr. Mohammad Hatta, SH.,MKn, selaku Pembimbing II
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan pengajaran kepada kami.
7. yang lebih selama mengikuti perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini belum sempurna, untuk itu penulis mengharpakan saran dan kritik demi penulisan tesis ini.

Jakarta, 16 April 2019

Penulis,



Yogi Firmanda Jatnika Pratama

4
5

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Kerangka Teori dan Konseptual.....	10
1.6 Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Kebijakan Legislatif dan Tujuan Pidana.....	23
2.1.1 Kebijakan Legislatif Mengenai Sanksi Pidana	23
2.1.2 Tujuan Pidana.....	33
2.2 Tinjauan Tentang Pidana Denda	41
2.2.1 Sejarah Perkembangan Pidana Denda.....	41
2.2.2 Pemberlakuan Pidana Denda Terhadap Pelaku Kejahatan	49
2.2.3 Pidana Denda Sebagai Alternatif Penjatuhan Pidana.....	55
2.2.4 Ketentuan Penerapan Pidana Denda	60
2.3 Pola dan Perumusan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Narkotika.....	63
2.3.1 Pola Pidana Denda di Indonesia.....	63
2.3.2 Pola Perumusan Ketentuan Pidana Denda Dalam Undang-Undang Narkotika.....	65
2.3.3 Perumusan Pidana Denda Maksimum Undang-Undang Narkotika.....	69
2.3.4 Pidana Denda Sebagai Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika.....	71
BAB III METODE PENELITIAN	75
3.1 Jenis Penelitian.....	75
3.2 Sumber Data.....	75
3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	76
3.4 Analisis Data	77
BAB IV KASUS DAN PEMBAHASAN	79
4.1 Kasus Posisi	79
4.2 Pertimbangan Hakim dan Mengeluarkan Putusan	90
4.3 Pembahasan.....	94
BAB V PENUTUP.....	99
5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	xiii